

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

-----, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

-----, 2007, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Bandung, 2007

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- 2009, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum nasional, Jakarta

Marcus Lukman, 1997, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung



M.A., Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Mustafa Luthfi dan J. Kurniawan, 2012, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik : Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal yang Pro Civil Society dan Gender*, Malang, Setara Press

Lilik, Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII Press. Yogyakarta.

Ridwan, HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sylvia Tiwon dalam Mustafa Luthfi dan J. Kurniawan, 2012, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik : Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal yang Pro Civil Society dan Gender*, Malang, Setara Press



Utrecht, dalam Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

W. Mack dalam Soerjono Soekanto, 2007 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

W. Sommermeijer, 2003, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta, PT. Intermasa

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurnal

Anggi Astari Amelia Putri dan Dahlan Ali, (2020), Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19, *Syah Kuala Law Journal*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2020.

Anggita Doramia Lumbanraja, (2020), Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan *Online* di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.

Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, (2020), Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi), *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Juli 2020.

Dian Cahyaningrum, (2020), Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum*, Volume XII, No.14/II/Puslit, Juli 2020.

Damayanti, Ruth Marina, (2014), Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Volume 5, Nomor 1.

Hanafi dan Reza Aditya Pamuji, (2019), Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2019.

Rizky P.Karo, (2020), Peradilan Tindak Pidana Melalui Media Elektronik (Sidang Pidana *Online*) Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat: Tantangan Dan Rekomendasi, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 17, Nomor 2, 2020.

RR. Dewi Anggraeni, (2020) Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, *ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 1, 2020.

Wahyu Iswanto, (2020), Persidangan Pidana Secara *Online*, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19, *Selidik*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2020.

Internet

Achmad Nasrudin Yahya, 09 Juli 2020, "*Menyoal Payung Hukum Persidangan Online*", Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431>, diakses tanggal 09 Juli 2020.

Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/09/2021), diakses pada 24 September 2021

